

II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Program PUAP

Program Pengembangan Usaha Agribisnis di pedesaan yang selanjutnya disebut PUAP, adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Hal ini dilakukan pemerintah adalah karena berdasarkan umpan balik dari bawah, masalah utama dalam menjalankan usaha ekonomi terutama dalam usaha agribisnis adalah (i) modal masyarakat lemah terutama masyarakat kategori miskin dan (ii) sulitnya masyarakat mengakses permodalan.

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak ada lembaga yang mengelola keuangannya. Oleh karena itu, dana PUAP dijadikan sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan. Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani, pengolah hasil dan pemasaran hasil pertanian, terutama untuk keluarga miskin di desa/kelurahan, melalui Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. Program PUAP adalah bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani (Departemen Pertanian, 2012).

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Program PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Program PUAP memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan (Departemen Pertanian, 2012).

Sasaran PUAP adalah (1) berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa, (2) berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, (3) meningkatnya kesejahteraan rumahtangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman (Departemen Pertanian, 2012).

Indikator Keberhasilan PUAP terdiri dari indikator keberhasilan *output* dan indikator keberhasilan *outcome*. Indikator keberhasilan *output* antara lain adalah tersalurkannya BLM – PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian dan terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Indikator keberhasilan *outcome* dapat dilihat dengan beberapa penilaian antara lain : (1) meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani, (2) meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha, (3) meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan, dan (4) meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Departemen Pertanian, 2012).

Indikator keberhasilan PUAP selanjutnya dapat dilihat dari indikator *benefit* dan *impact* antara lain (1) berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP, (2) berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani, dan (3) berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Departemen Pertanian, 2012).

Departemen Pertanian Republik Indonesia telah membuat pedoman ataupun prosedur tentang pelaksanaan dari proses penentuan penerima PUAP hingga penyaluran dana PUAP kepada Gapoktan. Adapun penjelasan tentang penentuan penerima, pemanfaatan dan prosedur pemanfaatan PUAP adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Penerima PUAP

Kriteria Gapoktan yang menerima bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah: (1) Memiliki struktur kepengurusan yang aktif (ketua, sekertaris, bendahara, unit usaha otonom) (2) Memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis (3) Dimiliki dan dikelola oleh petani. Prosedur alur penetapan Gapoktan yang menerima bantuan modal dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah (1) Gapoktan penerima PUAP ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri pertanian (2) Gapoktan yang ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan kepada Departemen Pertanian dengan tembusan tim pembina propinsi (3) Gapoktan yang disampaikan oleh bupati atau walikota selanjutnya ditetapkan oleh menteri pertanian (4) Gapoktan yang

telah ditetapkan oleh menteri pertanian selanjutnya menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) dan mempersiapkan dokumen pendukung administrasi lainnya (5) Gapoktan penerima PUAP mengirimkan RUB dan dokumen pendukung administrasi lainnya kepada Satker Pusat Pembiayaan Departemen pertanian melalui tim teknis kabupaten atau kota.

Tahapan penyusunan Rancangan Usaha Bersama (RUB) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah : (1) Gapoktan menyusun RUB melalui rapat anggota. RUB disusun berdasarkan kebutuhan petani anggota yang tergambar dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) (2) RUK disusun berdasarkan Rancangan Usaha Anggota (RUA) oleh petani anggota yang didasarkan pada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi desa yang dilakukan oleh penyuluh pendamping mencakup: (a) Usaha budidaya di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan (b) Usaha nonbudidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil dan usaha lainnya berbasis pertanian, (3) Rincian RUK diajukan oleh Poktan kepada pengurus Gapoktan meliputi: (a) Rincian nama petani anggota (b) Usaha produktif sesuai dengan kriteria PUAP (c) Volume usaha dan biaya (d) Nilai usaha dan ditandatangani petani anggota

b. Pemanfaatan Dana PUAP

Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan. Beberapa Prosedur menurut

peraturan tentang penarikan/pencairan dana PUAP adalah :

1. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui Poktan bahwa dana BLMPUAP telah masuk ke rekening Gapoktan.
2. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
3. Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA).
4. Penarikan/pencairan dana BLM PUAP dari Kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada rapat anggota;
5. Formulir penarikan dana BLM-PUAP harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara Gapoktan serta dilaporkan kepada tim teknis kabupaten/kota.
6. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK).
7. Dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA).

c. Prosedur Pemanfaatan Dana PUAP

Prosedur menurut peraturan tentang pemanfaatan dana PUAP adalah :

1. Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor pertanian sesuai dengan RUB/RUK/RUA yang telah disepakati.
2. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh bendahara Gapoktan.
3. Bilamana pemanfaatan Dana BLM-PUAP tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam Rencana Usaha Bersama (RUB), maka

Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan rencana usaha yang telah diputuskan melalui musyawarah/ Rapat Anggota (RA) dengan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan, dan diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan tim teknis kabupaten/kota.

4. Dana BLM-PUAP harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh Gapoktan sebagai modal dasar unit usaha otonom simpan pinjam yang selanjutnya dikembangkan menjadi LKMA.

2. Teori Kredit

a. Kredit dan Pinjaman Dana Bergulir

Dalam Peraturan Menteri Keuangan diatur bahwa suatu dana dikategorikan sebagai dana bergulir jika memenuhi karakteristik : (i) merupakan bagian dari keuangan negara, (ii) dicantumkan dalam APBN dan atau laporan keuangan negara, (iii) dimiliki, dikuasai, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), (iv) disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat (kelompok masyarakat), ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat (kelompok masyarakat) (revolving fund), (v) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya, dan (vi) dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 adalah : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu

perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditor atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Riva’I, dkk , 2008).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya, yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditor. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah berupa kegiatan jual beli, di mana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditor serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima dan karena Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of*

development, adalah untuk (Suyatna, dkk, 2007) :

- (1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- (3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Pemberian kredit harus mencakup kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pengusaha. Kredit tidak semata-mata menguntungkan pihak debitur maupun kreditur, tapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain dapat meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna dan peredaran barang, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional (Suyatna, dkk, 2007).

c. Jenis-Jenis Kredit

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir (2008), jenis-jenis kredit diklasifikasikan menjadi :

(1) Dilihat dari segi kegunaan, kredit dibagi atas dua jenis, yaitu :

- (a) Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- (b) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

(2) Dilihat dari segi tujuan, kredit dibagi atas tiga jenis, yaitu :

- (a) Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- (b) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- (c) Kredit Perdagangan, kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

- (3) Dilihat dari segi Jangka Waktu, kredit dibagi atas tiga jenis, yaitu :
- (a) Kredit Jangka Pendek, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - (b) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
 - (c) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- (4) Dilihat dari Segi Jaminan, kredit dibagi atas dua jenis, yaitu :
- (a) Kredit dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - (b) Kredit tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

- (5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha, kredit dibagi atas tujuh jenis, yaitu :
- (a) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - (b) Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
 - (c) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
 - (d) Kredit Pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
 - (e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
 - (f) Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
 - (g) Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

d. Prinsip Penilaian Kredit

Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi pihak bank dalam melakukan seleksi pengajuan kredit. Menurut Dahlan (2001), jenis prinsip yang biasa diterapkan dalam mempertimbangkan pengajuan kredit (analisis

kredit), yaitu prinsip '5C. Prinsip pemberian kredit dengan formula 5C adalah:

(a) *Character* (Kepribadian)

Pejabat analis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, temperamental, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit.

(b) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terikat dengan bidang usaha, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar.

(c) *Capital* (Modal)

Penilaian capital ini lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current assets* yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilities* disebut dengan *working capital*. Analisa *capital* ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank *proporsional*. Bank harus mengetahui *debt to equity ratio* yang mana dapat diperhitungkan dengan membandingkan besarnya seluruh hutang debitur dengan seluruh modal dan

cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Untuk pemohon kredit yang bekerja sebagai pegawai baik swasta maupun negeri harus menyertakan slip gaji dari perusahaan atau instansi sedangkan untuk calon debitur yang mempunyai penghasilan tidak tetap harus membuat surat keterangan penghasilan dengan mengetahui dari pihak kepala desa setempat.

(d) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit

(e) *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang diisyaratkan disini adalah kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Bila mungkin lebih dari tiga tahun kedepan bidang usaha masih layak dan prospektif.

e. Pengembalian Kredit (Kolektibilitas)

Pengertian pengembalian kredit (kolektibilitas) menurut Dahlan (2001) dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan adalah :

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian kredit (kolektibilitas) adalah kemampuan

debitur untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Penggolongan pengembalian kredit (kolektibilitas) dapat diukur melalui ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan tingkat kelancaran dalam pengembalian kredit, Dahlan (2001) menggolongkan tingkat kolektibilitas kredit ke dalam lima kategori, yaitu:

(1) Kredit lancar (*Pass*)

Kredit lancar adalah kredit yang pelunasan angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu dan jumlah (tidak pernah melakukan penunggakan).

(2) Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*)

Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus jika terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

(3) Kredit kurang lancar (*Sub-standard*)

Kredit kurang lancar adalah kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

(4) Kredit diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang diragukan merupakan kredit yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

(5) Kredit macet (*Loss*)

Kredit macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam lima (5) kelompok yang sudah dijelaskan di atas yaitu: lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat pengembalian/ kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan dan macet (Dahlan, 2001).

3. Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir dalam Astri (2011), kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Pihak perbankan (kreditur)

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisis datanya tidak objektif.

2. Pihak debitur

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal, yaitu :

a. Adanya unsur kesengajaan, artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.

b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur memiliki kamauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah (*force major*).

Penyebab terjadinya kredit macet menurut Dahlan (2001) disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank, antara lain:

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian kredit dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat kredit menempuh langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagai mana mestinya.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan ssesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit dalam suatu bank. Hal ini sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan yang menyampaikan data keuangan

yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab timbulnya kredit masalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam yang sangat dominan dalam keputusan kredit.

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit secara potensial akan mengalami masalah dan tidak dapat dilacak secara dini.

d. Lemahnya sistem informasi kredit

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan menyebabkan ketidakakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut yang menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

e. Itikad kurang baik dari pihak bank

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama ketentuan *legal lending limit*. Skenario

lain adalah pemilik dan pengurus bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya fiktif, padahal kredit digunakan untuk kepentingan pemilik atau pengurus bank untuk tujuan yang lain. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki itikad yang kurang baik

2. Faktor Eksternal

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit

Kegiatan usaha debitur rentan terhadap terjadinya penurunan kegiatan ekonomi dan dengan waktu yang sama tingkat suku bunga mengalami kenaikan yang tinggi. Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyebabkan tingkat bunga naik sehingga pada gilirannya bank tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan cara memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha yang tidak jelas atau untuk spekulatif. Dalam kondisi persaingan yang tajam sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.

c. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur terjadi karena sifat usaha debitur sensitif terhadap pengaruh eksternal misalnya kegagalan dalam pemasaran produk, terjadi perubahan harga di pasar perubahan pola konsumen dan pengaruh perekonomian nasional.

d. Debitur mengalami musibah

Musibah dapat terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan, sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi

4. Regresi Logistik (Logit)

Regresi logistik atau yang dikenal dengan logit merupakan bagian dari analisis regresi. Analisis regresi mengkaji hubungan pengaruh variabel-variabel penjelas terhadap variabel respon melalui model persamaan matematis tertentu (Firdaus dkk, 2008). Regresi logistik biner merupakan salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa faktor dengan sebuah variabel yang bersifat dikotomus (biner). Pada regresi logistik jika variabel responnya terdiri dari dua kategori misalnya $Y = 1$ menyatakan hasil yang diperoleh “sukses” dan $Y = 0$ menyatakan hasil yang diperoleh “gagal” maka regresi logistik tersebut menggunakan regresi logistik biner.

Menurut Yuwono (2005) model estimasi logit digunakan jika variabel gayut dalam suatu persamaan regresi berupa variabel kualitatif, baik yang diukur

pada skala nominal maupun skala ordinal. Penggunaan skala ini mengakibatkan nilai Y dibatasi pada nilai minimum p, dan nilai maksimum q. Regresi logistik merupakan merupakan suatu model analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel penduga berskala metrik (kontinu) atau kategorik (nominal) terhadap variabel respon yang berskala kategorik.

Menurut Gujarati (2006) regresi logistik digunakan untuk mengestimasi suatu model di mana variabel tak bebas, (Y), bersifat biner dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau dimilikinya suatu atribut (contohnya kawin, perempuan, bekerja, dan lain-lain) sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya atribut itu (contohnya tak kawin, pria, tidak bekerja, dan lain-lain).

Estimasi model regresi logistik menurut Gujarati (2006) :

$$Z_i = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n \dots \dots \dots (2)$$

B. Penelitian Terdahulu

Sari (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)” (Studi Kasus : BRI Unit Cibungbulang, Bogor). Hasil penelitian disebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro adalah jangka waktu pengembalian dan tingkat pendidikan sedangkan variabel lain seperti jumlah tanggungan keluarga, pendapatan bersih rumah tangga, frekuensi peminjaman, agunan dan omset tidak berpengaruh nyata. Faktor-faktor yang berpengaruh

nyata terhadap kelancaran pengembalian Kupedes yaitu faktor jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan rumah tangga. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi logistik (*logit*).

Putri (2011) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Faktor-faktor Pengembalian Kredit UMKM dalam Program Kemitraan Melalui Pendekatan Metode Logit” (Studi Kasus: PT. Telkom Area II Jakarta & Banten Khususnya Telkom Jakarta Barat). Analisis menggunakan teknik analisis Crosstabulation dan regresi logistik, diperoleh kesimpulan bahwa hanya ada tiga faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengembalian kredit adalah usia, omzet, bencana, sedangkan yang terbukti tidak berpengaruh nyata terhadap pengembalian kredit adalah gender, jumlah pinjaman, pengalaman usaha dan pendidikan.

Maria dan Rachmina (2011) melakukan penelitian mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat”. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*. Model analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis logit. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi KUR-Kupedes menggunakan model analisis linier berganda, sedangkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian KUR Kupedes menggunakan model analisis regresi logistic biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel omzet usaha per bulan, tingkat pendapatan per bulan, jenis usaha, jumlah kredit yang diajukan dan nilai agunan berpengaruh terhadap realisasi KUR- Kupedes pada BRI Unit X. Realisasi KUR-Kupedes BRI Unit pada jenis usaha *off farm* lebih besar dibandingkan jenis usaha *on farm*. Faktor-faktor yang berpengaruh

signifikan terhadap pengembalian KUR adalah jenis kelamin, kewajiban per bulan, jangka waktu pengembalian, dan tingkat pendidikan.

Asih (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengembalian kredit pengusaha kecil dalam program kemitraan Corporate Social Responsibility (studi kasus pada PT. Telkom Divre II Jakarta). Analisis menggunakan teknik analisis model binar (probit), diperoleh kesimpulan bahwa hanya ada dua faktor yang berpengaruh terhadap pengembalian kredit yaitu jumlah pinjaman dan penghasilan bersih usaha, sedangkan yang terbukti tidak berpengaruh terhadap pengembalian kredit adalah tingkat suku bunga, bencana, dan penghasilan di luar usaha.

Haloho (2010) menganalisis “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT BPD Jabar Banten KCP Dramaga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian KMU adalah variabel usia, tingkat pendidikan, dan jaminan kredit, sedangkan variabel independen yang tidak signifikan pengaruhnya bagi pengembalian KMU adalah jenis kelamin, status nasabah, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, aset usaha, omset usaha, total pendapatan usaha bersih, plafond kredit, jangka waktu pengembalian kredit, pengalaman kredit, dan tingkat suku bunga. Alat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian KMU, digunakan model analisis regresi logistik (logit biner).

Alamsyah (2007) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit macet pada kredit usaha pedesaan

(Kupedes) sektor agribisnis di BRI unit Ciomas, Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit macet Kupedes adalah jumlah tanggungan keluarga, jarak rumah debitur dengan Bank, dan omzet usaha yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga dan semakin jauh jaraknya dari rumah ke bank serta semakin kecil omzet usaha yang diperoleh maka kemungkinan timbulnya kredit macet semakin besar. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi logistik (logit).

Penelitian yang dilakukan oleh Martiana (2012) mengenai “Monitoring Dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang” menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian semua pinjaman dana BLM-PUAP di daerah penelitian tergolong macet. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemahaman yang salah tentang dana BLM-PUAP yang diberikan pemerintah kepada petani. Sebagian besar petani menganggap bahwa dana BLM-PUAP tidak perlu dikembalikan, karena dana BLM-PUAP adalah dana bantuan pemerintah.
- (2) Kurangnya kepercayaan petani anggota Gapoktan kepada pengurus Gapoktan dan kurangnya keteladanan dari pengurus Gapoktan dalam pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP.
- (3) Denda pinjaman sudah membengkak karena sudah lama tidak dikembalikan.

- (4) Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah (Dinas Pertanian) berkaitan dengan jalannya program PUAP.
- (5) Kurangnya kegiatan penyuluhan tentang meningkatkan usahatani para petani.
- (6) Tidak ada aturan atau sanksi tegas yang menjamin dana BLM PUAP diberdayakan secara optimal.

Penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggunakan tabulasi sederhana antara jumlah pinjaman petani anggota Gapoktan, jumlah pinjaman yang dikembalikan dan jumlah bulan pengembalian serta bentuk persentasenya untuk melihat tingkat pengembalian pinjaman (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet) dan faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian PUAP didapat berdasarkan hasil survei dan wawancara terhadap pemangku kepentingan dalam PUAP.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Ada kesamaan terhadap variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel penelitian, yaitu variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah pinjaman, dan pendapatan rumah tangga, selain itu kesamaan juga terjadi pada alat analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan alat analisis regresi logistik (logit) untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit usaha kelompok pada program PUAP.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang kredit usaha kelompok dalam program pengembangan usaha agribisnis

pedesaan (PUAP) yang pengelolaan peminjaman atau kredit dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani yang rentan terhadap kredit macet, selain itu penelitian ini menambahkan variabel dummy pengetahuan PUAP sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengembalian kredit PUAP.

Pengetahuan PUAP dimasukan dalam variabel penelitian karena menurut Engel *et al* (1994) kepribadian seseorang dapat digambarkan melalui pengetahuannya selain itu didukung juga dari hasil diskusi dan keterangan BP3K Kecamatan Bangun Rejo yang menyatakan salah satu penyebab rendahnya pengembalian kredit PUAP adalah karena kurangnya pengetahuan petani tentang PUAP itu sendiri, karena petani masih banyak yang menganggap bahwa PUAP merupakan dana dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Perbedaan penelitian ini yang lainnya adalah lokasi penelitian masih tergolong baru dan belum pernah ada yang meneliti di Gapoktan penerima PUAP di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, angka kemiskinan di pedesaan mengalami peningkatan, hal ini menjadi masalah pokok nasional, sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan millenium. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Kredit PUAP dapat berperan sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam mengatasi persoalan modal yang dihadapi kelompok tani. Pemberian kredit bagi pihak anggota kelompok tani diharapkan dapat mendukung kelancaran usaha dan berguna dalam peningkatan produktivitas dalam pertanian apabila kredit tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Kredit bagi kelompok tani juga berperan dalam pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, dan memperluas kesempatan berusaha yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan pelaku bidang pertanian.

Pemberian Kredit PUAP yang tepat sasaran bagi sektor pertanian akan menjadi pendorong berkembangnya skala usaha pada sektor tersebut dan meningkatkan produktivitas usahanya dengan harapan dapat menambah pendapatan yang diterima dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Namun permasalahan yang muncul ialah adanya keterlambatan pengembalian (pelunasan) kredit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari sisi peminjam. Hal

ini tentu saja merugikan pihak Gapoktan karena perguliran modal PUAP menjadi terganggu dan menurunnya pendapatan Gapoktan yang semestinya diperoleh dari hasil pemberian kredit PUAP. Hal inilah yang mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit.

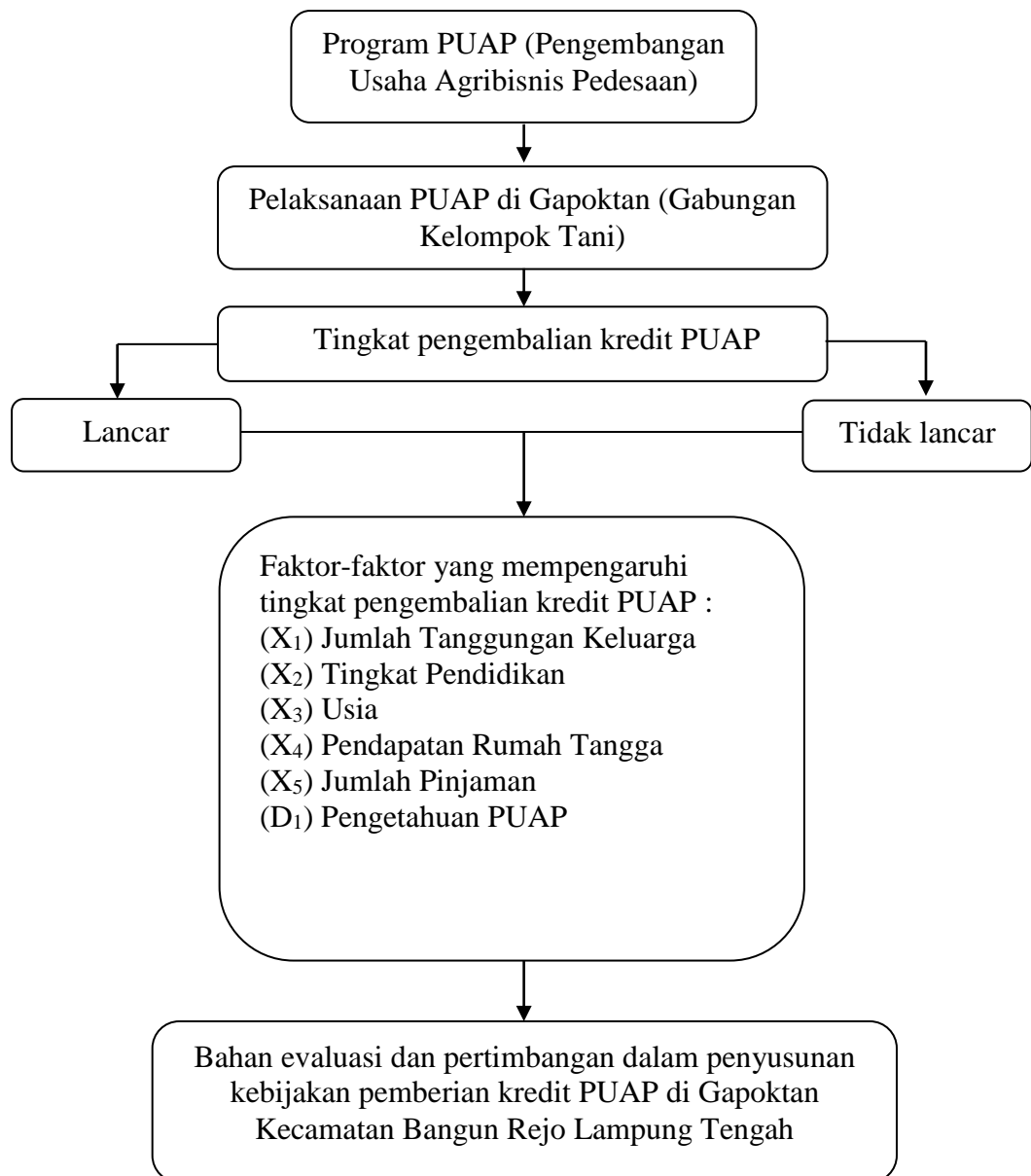
Pengembalian Kredit PUAP digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran dan bunga dilakukan tepat waktu berdasarkan perjanjian. Kredit digolongkan tidak lancar (menunggak) dalam pengembailannya jika pembayaran angsuran dan bunga mengalami penundaan dari waktu yang diperjanjikan. Pengembalian kredit yang tidak lancar digolongkan dalam empat tingkatan (status) oleh Gapoktan menyesuaikan dengan pengklasifikasian yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu: (1) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), yaitu suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, (2) Kredit kurang lancar (*Sub-standard*), yaitu kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, (3) Kredit diragukan (*Doubtful*), yaitu kredit yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, (4) Kredit macet (*Loss*), yaitu kredit yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Dahlan, 2001).

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian Kredit PUAP dan membedakan kelompok peminjam yang tergolong lancar dan

menunggak dalam pengembalian kredit tersebut diduga terdiri dari faktor usia, tingkat pendidikan, dan jumlah tanggungan dalam keluarga dan pengetahuan tentang PUAP yang merupakan karakteristik personal, sedangkan karakteristik usaha yang diduga berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian Kredit PUAP adalah total pendapatan rumah tangga. Selain itu, karakteristik kredit yang diduga berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian Kredit PUAP adalah jumlah pinjaman.

Pemilihan semua faktor atau variabel yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit didasarkan pada hasil diskusi terhadap pihak BPTP Provinsi Lampung dan BP3K Kecamatan Bangun Rejo serta didukung oleh referensi dari penelitian sebelumnya. Faktor-faktor di atas akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit.

Besarnya pengaruh masing-masing faktor akan dapat terlihat dengan melakukan analisis regresi logistik. Hasil analisis akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan ditempuh guna mengatasi permasalahan kredit PUAP Gapoktan di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah. Kerangka pemikiran operasional yang telah diuraikan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Kelompok Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah”, 2014

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis, yaitu :

Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit PUAP adalah usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan rumah tangga, jumlah pinjaman dan pengetahuan PUAP peminjam.